

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang

2022

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah Kecamatan Banyuates Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

LKjIP Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan sasaran Renstra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang diturunkan ke Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk terciptanya *good governance* sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang baik untuk mewujudkan pelayanan masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga LKjIP Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang dan sebagai tolok ukur penetapan kinerja untuk tahun berikutnya.

Banyuates, Februari 2023

CAMAT BANYUATES

FAJAR SIDIQ,S.STP. M.SI

Penata Tingkat I

Nip. 19860627 200412 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	3
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis	10
D. Cascading Kinerja	13
E. Peta Proses Bisnis	15
F. Ringkasan LHE	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis (Renstra)	21
B. Perjanjian Kinerja	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	227
B. Realisasi Anggaran	34
C. Tindak Lanjut Laporan Evaluasi	36
BAB IV : PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuates Tahun 2022, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banyuates sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang yang didukung oleh Kecamatan Banyuates yaitu :

” Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu “.

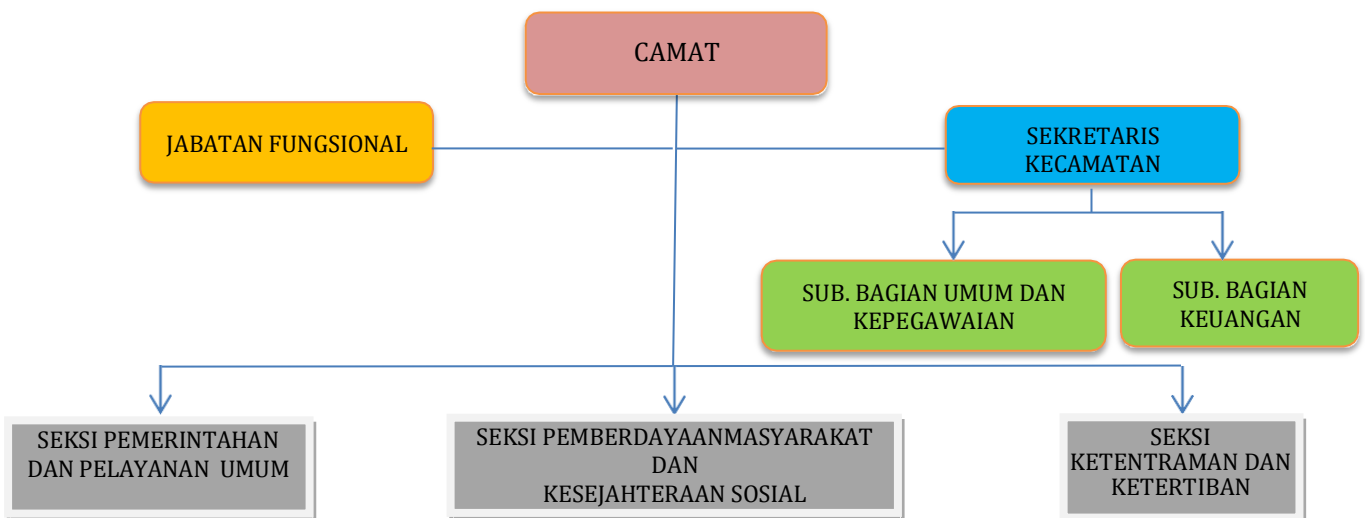
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Camat Banyuates melalui Peraturan Bupati Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan di Kabupaten Sampang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sampang maka Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

GAMBARAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Susunan Organisasi Kecamatan Banyuates

1. Camat
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

B. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

1. CAMAT

Tugas Camat adalah memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas yang diembannya seorang Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas seorang camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pelayanan Umum dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban dan beserta staf pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- e. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan / keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa ; dan
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- j. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- k. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- l. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi

- hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
 - e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
 - f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
 - h. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Menyusun program dan pembinaan bidang kependaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
 - j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
 - k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
 - m. Melaksanakan dan mengkoordinasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitas penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat ;
 - o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial ;
 - p. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan; dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan

- ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
 - h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banyuates baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan Analisa Pohon Masalah sebagai berikut :

Pohon Masalah Kecamatan Banyuates

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai SKM hanya sedikit di atas target	Penerapan Standar Pelayanan Belum Maksimal	Rendahnya kepatuhan terhadap Maklumat Pelayanan
			Masih belum maksimalnya kompetensi SDM Aparatur dalam memberikan pelayanan	Rendahnya kapasitas SDM dalam bidang IT serta Kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi yang ada
2	Desa Mandiri masih relatif sedikit	Peningkatan desa yang naik Type belum maksimal	Belum optimalnya fungsi kontroling terhadap perencanaan pembangunan desa	Belum optimalnya proses verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan daerah
			Lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data	Belum optimalnya pembinaan khusus terhadap korespondensi data

Sebagai sebuah konsep pemecahan masalah, analisis pohon masalah dapat mendeteksi seluruh permasalahan hingga ke akar masalah. Pohon masalah juga dapat mendekatkan isu-isu yang berhubungan dengan konsep masalah yang bisa membantu dalam menganalisis sebab dan akibatnya masalah tersebut.

Isu Strategis sebagai sebuah perkembangan kedepan baik yang terjadi didalam organisasi maupun diluar organisasi, yang cenderung memiliki dampak penting terhadap kemampuan untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan kondisi yang ada pada Kecamatan Banyuates dapat dirumuskan 2 (dua) isu strategis yakni :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya untuk mewujudkan peningkatan pelayanan

publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan beberapa pelayanan dasar lainnya.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Banyuates diangkat sebagai isu strategis didasarkan pada masalah pokok yang terjadi yakni Peningkatan nilai SKM hanya sedikit diatas target. Peningkatan nilai SKM menjadi tolok ukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Banyuates. Lantas mengapa nilai SKM Kecamatan Banyuates belum mencapai target? Ada dua masalah yang menyebabkan nilai SKM Kecamatan Banyuates hanya sedikit diatas target, yakni : Penerapan standar pelayanan yang belum maksimal dan masih belum maksimalnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan.

Perihal utama yang menyebabkan penerapan standar pelayanan yang belum maksimal pada Kecamatan Banyuates adalah rendahnya kepatuhan terhadap maklumat pelayanan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang belum sepenuhnya menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam maklumat pelayanan terutama alur pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan yang seharusnya diterapkan.

Ada dua hal yang mendasari dirumuskannya statement masalah masih rendahnya kompetensi SDM aparatur dalam pelayanan di Kecamatan Banyuates yakni rendahnya kapasitas SDM dalam bidang IT dan kurangnya jumlah personel serta pemahanan SDM terkait regulasi.

Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas serta Transparansi yang ditawarkan kemajuan IT terhadap dunia kerja mau tidak mau menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan setiap pelaku didalamnya untuk turut serta mengikuti perkembangannya.

Penguasaan bidang IT saat ini menjadi salah satu syarat mutlak yang menjadi ukuran kemampuan dasar kompetensi seseorang. Sedangkan kurangnya pemahaman SDM terkait regulasi dapat dilihat dari jumlah personil yang memahami secara menyeluruh terkait perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemahaman SDM terhadap regulasi dianggap penting karena juga akan menimbulkan efek berantai terhadap permasalahan yang dialami oleh Kecamatan Banyuates.

2. Desa Mandiri masih relatif sedikit

Sebagai sebuah amanat dalam RPJM-D Kabupaten Sampang 2019-2024, meningkatkan jumlah desa mandiri juga menjadi tanggung jawab Kecamatan Banyuates yang berada dalam satu kesatuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang. Kecamatan Banyuates terdiri dari 20 (dua puluh) desa dimana dari 20 (dua puluh) desa tersebut baru 1 (satu) desa yang berada dalam kategori desa Mandiri yaitu Desa Banyuates sedangkan 19 (Sembilan belas) desa lainnya masih belum mencapai kategori desa mandiri. Masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya jumlah desa mandiri pada Kecamatan Banyuates didasari pada peningkatan desa yang naik type belum maksimal. Sedangkan lambatnya peningkatan jumlah desa yang naik type disebabkan oleh beberapa masalah yakni belum optimalnya fungsi kontroling terhadap perencanaan pembangunan desa dan lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data.

Salah satu peran Kecamatan dalam mendorong kemajuan desa dapat dilihat melalui salah satu fungsinya yaitu fungsi controlling khususnya terhadap perencanaan pembangunan desa. Kontrol Kecamatan terhadap perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari Verifikasi Kecamatan mulai dari perumusan RPJMD hingga usulan yang diajukan Pemerintah Desa dalam Musrenbang. Fungsi controlling yang diwujudkan dalam bentuk verifikasi Kecamatan terhadap desa merupakan suatu bentuk intervensi Pemerintah Daerah terhadap Desa dalam mengkontrol pembangunan desa yang di dasari dari urgensinya.

Belum optimalnya proses verifikasi dan sinkronisasi Pembangunan Desa dengan daerah menjadi ciri dari fungsi controlling yang belum maksimal oleh Kecamatan. Sebagai jembatan antara desa dengan leading sector di atasnya melalui fungsi verifikasi, kecamatan menjadi salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila proses verifikasi dan sinkronisasi yang belum optimal menyebabkan tumpulnya arah perencanaan pembangunan desa sehingga memperlambat kemajuan desa itu sendiri.

Selain itu lemahnya kepatuhan desa dalam korespondensi data juga menjadi salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan status desa. Korespondensi data menjadi tolak ukur pemerintah pusat dalam menilai sejauh mana kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. Ketidapatuhan desa terhadap korespondensi data disebabkan pula oleh belum optimalnya pembinaan khususnya terhadap korespondensi data oleh daerah. Pemerintah Daerah yang belum memaksimalkan pembinaan khusus terhadap desa dalam korespondensi data merupakan salah satu akar penyebab masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Kecamatan Banyuates.

D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Banyuates selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dansasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

CASCADING / POHON KINERJA KECAMATAN BANYUATES TAHUN 2022

TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM		KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif	a) 20 desa b) 20 desa
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	a) 20 desa b) 13 desa
					Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%	

						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok
				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan d. Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin kegiatan e. Jumlah tenaga kebersihan f. Jumlah Pemenuhan bahan bacaan.	a. 400 surat b. 12 bulan c. 13 unit d. 600 ob e. 3 Ok f. 12 bulan
						Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang penggandaan d. Jumlah komponen instalasi listrik e. Jumlah pemenuhan bahan kebersihan f. Jumlah kebutuhan materai dan benda pos	a. 30 jenis b. 12 jenis c. 8000 jenis d. 12 jenis e. 26 jenis f. 400 lembar
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. 72 ok b. 6 ok
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dibangun b. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit
						Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dibangun b. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 unit
						Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit
						Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah peralatan kantor yang dipelihara c. Jumlah pengadaan perlengkapan kantor d. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	a. 4 unit b. 30 unit c. 3 unit d. 12 buah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/sosialisasi/seminar	1 Ok
				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran,	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok

				Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok
						Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	a. 1 dok b. 2 kali

E. PETA PROSES BISNIS

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

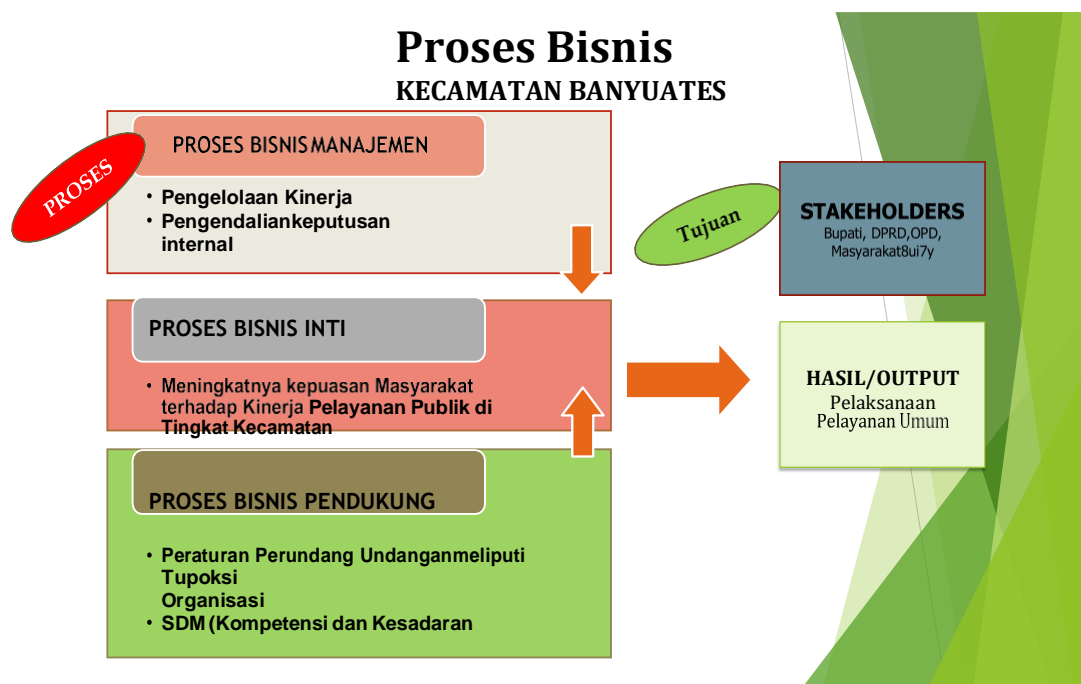
Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

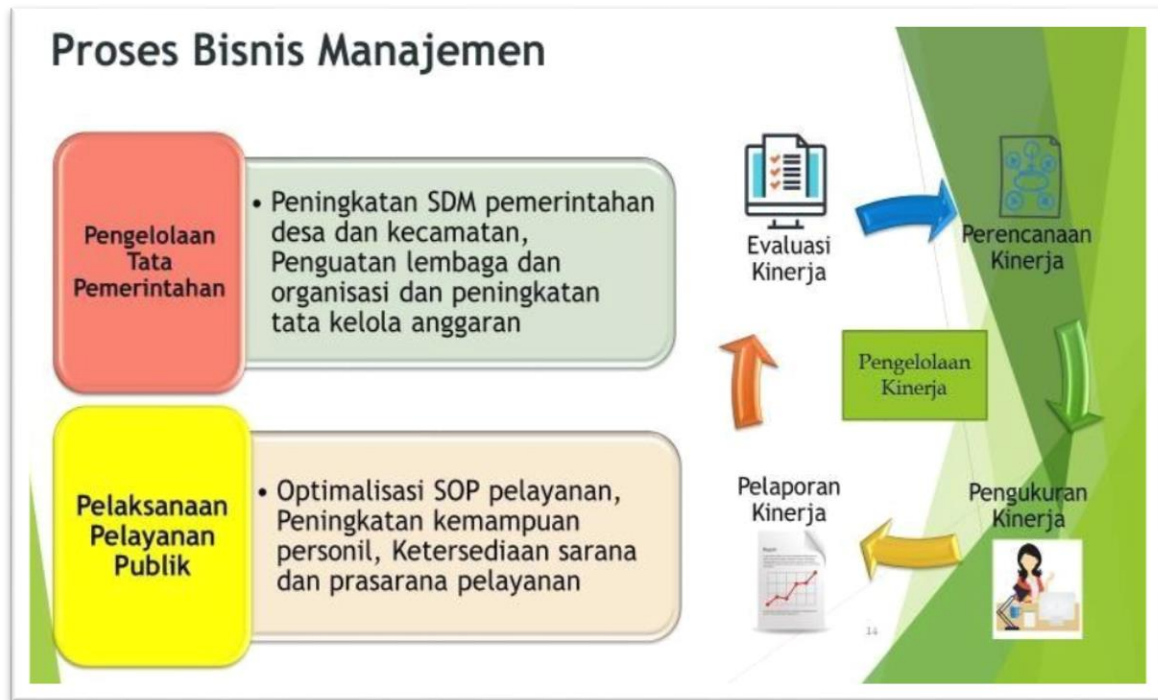
Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang :





INTI PROSES BISNIS KECAMATAN BANYUATES



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2020 nomor : 065/450.38/434.100/2021 tanggal 02 November 2021, beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Camat Banyuates Kabupaten Sampang agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1) Pemenuhan Kualitas dan Implementasi Renstra

- a. Rumusan tujuan belum berorientasi hasil dimana rumusan tujuan tidak menggambarkan tugas pokok dan fungsi utama Kecamatan yakni meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.
- b. Indikator tujuan hanya mengukur aspek pelayanan saja sehingga kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan, peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan, fasilitasi pelaksanaan

musrenbang RKPD di Kecamatan dan pembinaan monitoring pelayanan administrasi desa menjadi tidak relevan dan bukan penyebab langsung pada indikator program peningkatan pelayanan publik tingkat Kecamatan.

- c. Indikator Kinerja belum dapat diukur karena pelayanan di Kecamatan tidak relevan dengan indikator IKM.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Rencana Aksi atas kinerja belum ada/tidak dibuat

C. Pengukuran Kinerja

1.) Kualitas Pengukuran

- a. IKU belum cukup untuk mengukur kinerja
- b. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi

2) Implementasi Pengukuran

- a. Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap bulan karena belum terdapat dokumentasi hasil monitoring dan belum terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.
- b. IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberi) reward dan punishment.
- d. IKU belum di reviu secara berkala.

D. Pelaporan Kinerja

- 1) Informasi yang disajikan belum sesuai kriteria dengan data yang bisa diandalkan
- 2) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

E.. Evaluasi Internal

1) Kualitas Pengukuran

Evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan

2) Pemanfaatan pengukuran

Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2024

Rencana Strategis Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“Sampang Hebat Bermartabat”

Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi mengelola pelayanan sehingga mendukung **Misi 4**, yaitu :

Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Adapun tujuan dari Misi 4 ini adalah **“Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik”** dengan salah satu sarannya adalah **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Selanjutnya ditetapkan tujuan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, yaitu :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

dengan indikator kinerja tujuan adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- b. Meningkatnya kinerja ASN

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan
Banyuates Tahun 2019-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Banyuates	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,25

Sumber : Renstra Kecamatan Banyuates Kab. Sampang 2019-2024

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 merupakan komitmen bersama yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Pada tahun 2022 Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah membuat perjanjian kinerja dengan Bupati Sampang dalam pencapaian kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja dalam hal ini berupa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan sehingga dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Banyuates

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Banyuates Tahun 2022

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut Kecamatan Banyuates mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 3.095.963.239.00,- yang digunakan untuk melaksanakan 30 kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Banyuates Tahun 2022

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (setelah perubahan)
	BELANJA LANGSUNG	3.095.963.239.00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.980.454.322.00
I.1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	978.828.00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.258.457.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	837.770.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.165.942.00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.702.116.00
	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.404.979.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.111.408.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Triwulan/Semester SKPD	1.543.212.00
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.605.967.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	54.455.917.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.258.413.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.329.304.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00
II.1	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.200.000.00
II.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kondultasi SKPD	133.042.400.00
II.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
II.4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	66.000.000,00
	Pengadaan Mebel	24.107.750.00
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	63.065.815.00
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.878.588.00
	Penyediaan Jasa Koneksi, Sumber Daya air dan listrik	50.004.00.00
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	39.000.000,00
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasioanal atau lapangan	4.550.000.00
	Pemeliharaan Mebel	7.200.000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	18.000.000.00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	185.170.000.00

V	Penataan Organisasi	
	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10.874.456.00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada MAsyarakat di Wilayah Kecamatan	5.035.397.00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.116.146.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan MAsyarakat di Wilayah Kecamatan	37.905.471.00
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	19.505.572.00
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.163.544.00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.782.787.00

Sumber : DPPA Kecamatan Banyuates Kab. Sampang TA. 2022

Sumber Anggaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating*

dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundangan-undangan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dapat disajikan dalam bentuk tabel Capaian Kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang disusun sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Banyuates Tahun 2022

Sasaran			Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi	
1 Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	%	100	66	66	100%
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	%	81.75	82.00	82.96	100%
3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	%	100	100	100	100%
4 Meningkatkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan gangguan Kamtibmas	%	20	20	20	100%

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2022, berdasarkan hasil survey pada Masyarakat Kecamatan Banyuates, diperoleh nilai sebesar 82.96% Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total dari nilai persepsi perunsur dibagi dengan Total Unsur yang terisi dikalikan Nilai Penimbang

Didapat : $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
2. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik

Kendala :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Banyuates tidak mencapai target pada RPJMD karena semakin kritisnya masyarakat yang disertai dengan semakin tingginya tuntutan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kabupaten Sampang sedangkan OPD belum melakukan perbaikan pelayanan publik dan Minimnya Petugas Pelayanan yang menguasai IT sehingga memperlambat proses pelayanan pada masyarakat.

Upaya Mengatasi :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kecamatan Banyuates dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sampang. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.
2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya
Kecamatan Banyuates

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	20	-	20	20	20
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82.00	80,50	80,54	81,75	82.96
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	100	100	100	100	100
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan gangguan Kamtibmas	20	20	20	20	20

Jika realisasi Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
Kecamatan Banyuates

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	75	66	88%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82,55	82.96	100%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	100	100	100%

Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan gangguan Kamtibmas	20	20	100%
---	---	----	----	------

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional Kecamatan Banyuates

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL1	KET
1	2	3	4	5
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	66	-	Tidak Tersedia Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82.96	-	Tidak Tersedia Data
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	100	-	Tidak Tersedia Data
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan gangguan Kamtibmas	20	-	Tidak Tersedia Data

Perbandingan realisasi Kinerja Kecamatan Banyuates dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia dalam data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.6
Alokasi per Sasaran Pembangunan (cost per outcomes)
Kecamatan Banyuates

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1	2	3	4
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	16.257.692,00	0,57
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	2.980.454.322.00	97.32
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	33.116.146.00	99.99
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan gangguan Kamtibmas	19.503.572.00	99.99

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. 3.095.963.239.00. Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau *cost per outcome* dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
Kecamatan Banyuates

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	66	66	100	16.257.692,00	16.242.000,00	99,90
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82.00	82.96	100	2.980.454.322.00	2.900.821.651.00	97.32
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	100	100	100	33.116.146.00	33.113.980.00	99,99
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan gangguan Kamtibmas	20	20	100	19.503.572.00	19.503.000.00	99,99

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Desa Maju	66	99,90	-33,9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82.96	97.32	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik	100	99,99	0,1
Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Penyelesaian Konflik Sosial Politik	Persentase Penurunan gangguan Kamtibmas	100	99,99	0,01

Berdasarkan tabel 3.8 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil meskipun pada masing-masing sasaran belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DPA-Perubahan Tahun Anggaran 2022 anggaran Kecamatan Banyuates sebesar Rp. 3.095.963.239.00 dan realisasi sebesar Rp. 3.014.035.631.00 dengan persentase 97.35%. Untuk kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 setelah P-APBD sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah Rp. 0,00
b. Belanja DaerahRp. 3.095.963.239.00

Terdiri dari :

2. Belanja Tidak Langsung Rp.
3. Belanja Langsung Rp. 3.014.035.631.00

Tabel 3.9
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja
Kecamatan Banyuates Tahun 2022

No	Uraian	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	KECAMATAN BANYUATES	3.095.963.239,-	3.014.035.631,-	97.35
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang	2.980.454.322,-	2.900.821.651,-	97.32
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	978.828,-	975.875,-	99,69
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.258.457,-	1.254.000,-	99.64
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	837.770,-	833.000,-	99,43
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.165.942,-	1.161.000,-	99.58
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.218.761.716,-	2.160.161.936,-	97.35
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.702.117,-	2.155.117.436,-	97.35
2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN			
3	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.404.979,-	2.398.500,-	99,73
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.111.408,-	1.107.000,-	99,60
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Triwulan/Semesteran	1.543.212,-	1.539.000	99,72
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.692.110,-	275.814.750,-	98.26
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.605.967,-	15.605.000,-	99.99

2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	54.455.917,-	54.454.000,-	99,99
3	Penyediaan bahan Logistik Kantor	39.258.413,-	39.256.000,-	99,99
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.329.413,-	29.328.750,-	99,99
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,-	1.800.000,-	100
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000,-	7.200.000,-	100
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.042.400,-	128.171.000,-	96,33
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	186.169.956,-	179.265.000,-	96,29
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	66.000.000,-	61.200.000,-	92,72
2	Pengadaan Mebel	24.107.750,-	23.865.000,-	98,99
3	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	96.062.206,-	94.200.000,-	93,41
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.791.588,-	95.739.990,-	97,90
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.787.588,-	8.878.000,-	99,99
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	50.004.000,-	47.861.990,-	95,71
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	39.000.000,-	39.000.000,-	100
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	225.794.456,-	220.991.750,-	97,87
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasioanal atau lapangan	4.550.000,-	316.000,-	6,94
2	Pemeliharaan Meubelair	7.200.000,-	7.200.000,-	100
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	18.000.000,-	18.000.000,-	100
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	185.170.000,-	184.606.250,-	99,69
5	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata laksana	10.874.456,-	10.869.500,-	99,99
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.035.397,-	5.030.000,-	99,89
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.035.397,-	5.030.000,-	99,99
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	71.021.617,-	71.017.980,-	99,99
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	33.116.146,-	33.113.980,-	99,99
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.905.471,-	37.904.000,-	99,99
	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.505.572	19.503.000	99,99

1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	19.505.572,-	19.503.000,-	99,99
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.946.331	17.663.000	88.55
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.163.544,-	10.163.000,-	99,99
2	Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	9.782.787,-	7.500.000,-	76,67

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan Program Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,99 %. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program/kegiatan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan penyerapan anggaran hanya sebesar 88,55%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2021		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
1	Pada Kualitas Renstra	Agar mereviu rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil yakni :
		a. Berkualitas outcome atau output penting
		b. Menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud
		c. Terkait dengan isu strategis dan

		d. Sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
		Agar mereviu indicator kinerja sesuai kriteria SMART
		a. Spesific, tidak berdwimakna
		b. Measurable, dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya
		c. Achievable, dapat dicapai, relevan dengan tugas dan fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable)
		d. Relevance, terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur
		e. Timebound, mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu
		f. Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program.
2	Pada Perencanaan Kinerja Tahunan	Agar membuat Rencana Aksi
	B. Pengukuran Kinerja	
1	Kualitas Pengukuran	Agar pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi menggunakan bantuan teknologi
2	Implementasi Pengukuran	a. Agar capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
		b. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya
		c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas kaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment
		d. Mereviu IKU secara berkala dan memanfaatkannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
	C. Pelaporan Kinerja	Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standar dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
	D. Evaluasi Internal	a. Lakukan evaluasi dan pamantauan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja
		b. Lakukan pemantauan rencana aksi untuk memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan
		c. Hasil evaluasi rencana aksi perlu ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai. Target kinerja yang dilaporak dalam laporan kinerja instansi pemerintah untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
----	---------------------------------------	---

BAB IV

PENUTUP

LKjIP Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam melaporkan akuntabilitas kinerjanya berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. LKjIP ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang dialami oleh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang pada tahun 2022.

Dengan tersusunnya LKjIP Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sampang.

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Tahun 2022 diperoleh kesimpulan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Anggaran sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan. Dalam menggunakan anggaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari **capaian realisasi keuangan** program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang direncanakan rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mencapai 100% sehingga dana yang masih tersisa dari anggaran yang direncanakan dapat dikembalikan ke kas daerah.

B. SARAN

Dari uraian capaian kinerja Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara untuk target kinerja yang belum atau tidak tercapai perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak.

Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depan khususnya yang bersifat internal di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Sedangkan faktor penghambat yang bersifat eksternal akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan lebih intensif.

Melalui LKjIP ini diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang guna tercapainya visi dan misi Kabupaten Sampang.

Banyuates, Februari 2022
CAMAT BANYUATES

FAJAR SIDIQ,S.STP. M.SI
Penata Tingkat I
Nip. 19860627 200412 1 001